

**STUDI TENTANG POLA-POLA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN OLEH LPKSM SOLO RAYA DI SURAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh :**

**ALFAN NOFENDHI**

**C 100 090 158**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

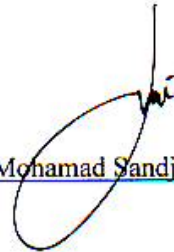
Naskah Publikasi ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Bp. Kelik Wardiono S.H., M.H.

Pembimbing II



Bp. Mohamad Sandjaja S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Bp. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Nofendhi

NIM : C 100 090 158

Alamat : Satrian, Bulurejo, Juwiring, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis saya, naskah publikasi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Maret 2014

Yang membuat pernyataan



Alfian Nofendhi  
NIM: C 100 090 158

**STUDI TENTANG POLA-POLA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN OLEH LPKSM SOLO RAYA DI SURAKARTA**

**ALFAN NOFENDHI**

**C 100 090 158**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kedudukan LPKSM Solo Raya dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen dan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPKSM Solo Raya dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana LPKSM berkedudukan sebagai penggugat dalam surat kuasanya dan gugatan masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) walaupun dari beberapa gugatan ditolak. Selain itu LPKSM sering melakukan pendampingan dalam perkara pidana yang dialami konsumen khususnya terhadap kasus tuduhan penggelapan barang fiducia barang bergerak di kepolisian dan rata-rata hampir kasus tidak dilanjutkan karena banyak sekali lembaga pembiayaan yang tidak mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2012 yang mewajibkan kepada lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan transaksi kredit fiducia ke notaris.

Kata Kunci : Pola perlindungan hukum, Penyelesaian sengketa, LPKSM Solo.

**ABSTRACT**

*The purpose of these researches is to know the position of Solo LPKSM Kingdom in handles consumer complaints and resolve disputes and to describe patterns and mengeksplanasikan protection of the law by LPKSM Solo Raya in handles complaints and resolve disputes konsumen. researches, the writer uses a method based on the approach legal research conducted by a non-doctrinal approach is qualitative. Helping consumers in the fight haknyadengan filed a law suit in which the plaintiff is domiciled LPKSM attorney letter and the lawsuit is still not legally enforceable (*inkracht*) although from some lawsuit rejected . Additionally LPKSM often provide guidance in the criminal case that experienced by consumers, especially in cases of allegations of embezzlement of Fiduciary moving goods in the police and an average of nearly the case did not proceed because a lot of financial institutions that do not heed the Finance Minister Regulation (PMK) No. 130/2012 which requires the financial institution to register a credit transaction fiduciary to the notary.*

**Keywords : Pattern legal protection, Dispute resolution, LPKSM Solo.**

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwasanya yang disebut sebagai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, namun sepertinya implementasi dari undang-undang ini masih sangat jauh. Masyarakat diarahkan bersikap konsumtif yang dikendalikan oleh pasar, industri dan bisnis. Tidak benar jika masyarakat sekarang disebut sebagai masyarakat agraris, itu hanya tinggal sebagai simbol saja.

Lihat saja faktanya di lapangan, pasar lokal diganti dengan mall, supermarket dan sejenisnya itu semua karena adanya kepentingan. Masyarakat modern hidup di era globalisasi yang mempengaruhi berbagai bidang. Kondisi itu mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair trade practice*). Itu semua juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan multinasional dan transnasional. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://lpksmpublik.blogspot.com/>, di akses 26 Mei 2013 Pukul 08.00 WIB.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. LPKSM sebagai arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.<sup>2</sup>

Tugas LPKSM dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan perlindungan konsumen. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat independensi dari suatu LSM yang mewakili kepentingan rakyat khususnya dalam perlindungan konsumen yang mengebiri hak dari LSM untuk melakukan kritik koreksi terhadap tanggung jawab dari pemerintah dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di dalam masyarakat sebagaimana di uraikan di paragraf di atas.

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.213.

Dari tugas yang limitatif dan cenderung intervensi kekuasaan tersebut dalam Pasal 3 PP No. 59 Tahun 2001 tersebut mencerminkan LPKSM sulit mewujudkan sebagai bagian dari LSM yang bebas melakukan kritik yang membangun untuk melakukan perlindungan konsumen. Bahkan ketentuan Pasal 3 PP No. 59 Tahun 2001 tersebut justru inkonsisten dengan hakikat independensi suatu LSM yang mewakili masyarakat dan hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 3 PP. No. 59 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dan kritik terhadap LPKSM di atas oleh beberapa sumber penelitian di literatur, diperlukan suatu penelitian lanjutan yang lebih ilmiah untuk membuktikan suatu hipotesa dari kritik yang berkembang mengenai eksistensi lembaga LPKSM khususnya di Kota Surakarta. Untuk menjawab permasalahan di atas maka Penulis tertarik untuk menulis “Studi Tentang Pola-Pola Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh LPKSM Solo Raya di Surakarta”.

### **Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah kedudukan LPKSM Solo Raya dalam menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen? *Kedua*, bagaimanakah pola-pola perlindungan hukum yang dilakukan

oleh LPKSM Solo Raya dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian: *Pertama*, objektif untuk mendeskripsikan kedudukan LPKSM Solo Raya dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen, untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPKSM Solo Raya dalam menanggapi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen. *Kedua*, tujuan subjektif untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi pada masyarakat serta untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen khususnya terhadap peran dari LPKSM Solo Raya dalam melakukan perlindungan hukum.

Manfaat penelitian: *Pertama*, manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pola-pola perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPKSM Solo Raya untuk melindungi konsumen dari terjadinya sengketa konsumen. *Kedua*, manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak baik masyarakat secara umum, pelaku usaha, konsumen, serta diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat.



## **Metode Penelitian**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah dipahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

## **Tinjuan Pustaka**

### **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Sengketa Konsumen**

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hukum perlindungan konsumen harus dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) unsur, yaitu ketertiban, keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

### **Tinjauan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat**

Penjelasan tentang syarat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut, sesungguhnya telah dapat diketahui dari pengertian yang tersebut pada Pasal 1 angka 9 UUPK. Walaupun Lembaga

---

<sup>4</sup> Rachmad Usman, 2004, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, hal 224.

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikatakan sebagai Lembaga non Pemerintah, tetapi bukanlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selama ini diketahui “independen”, mengingat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang ini harus didaftarkan dan mendapat pengakuan Pemerintah, dengan tugas-tugas yang masih harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, maka dalam Pasal 2 menentukan bahwa: Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yakni terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.

LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa lembaga pendaftaran dimaksudkan hanya sebagai alat kontrol bagi pemerintah yang tidak memberikan pengaruh apa pun bagi independensi LPKSM. Demikian pula dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, yang menentukan bahwa untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat Menurut Robert B. Seidmann**

Dilihat dari kaca mata sistem, maka persoalan hukum menjadi semakin kompleks. Disatu sisi hukum dipandang suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *groundnorm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus menuntun penegakan hukum, maka *groundnorm* merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum.

Mengefektifkan hukum positif bukan langkah yang mudah karena untuk dibutuhkan keberanian, keberanian di sini berkaitan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena disadari dari memang menafsirkan undang-undang bukanlah pekerjaan yang sederhana.

Ada doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa suatu kesalahan” (asas legalitas). Tidak ada peristiwa pidana jika dalam undang-undang tidak menyebutkan kesalahan terlebih dahulu, sering menjadi pagar bagi penegak hukum kita untuk menerapkan aturan. Padahal jika menilik pada asas yang lain, seorang hakim tidak menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturannya. Di sini terjadi kontradiksi, satu sisi undang-undang melarang adanya penafsiran, tetapi di sisi lain hakim dibebani untuk membuat aturan. Hukum positif yang ada tetap akan berlaku efektif jika penegak hukum berani melakukan modifikasi hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rapin Mudiarto, 1993, *Bekerjanya Hukum Positif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 89.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan LPKSM Solo Raya dalam Menangani Pengaduan dan Menyelesaikan Sengketa Konsumen**

Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lembaga ini dapat berperan aktif untuk mewujudkan Perlindungan Konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen hak-haknya dan kewajiban, melakukan penelitian serta pengujian, menerima pengaduan dalam bentuk apapun, tetapi juga melakukan tindakan mediasi advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Jadi dapat dijelaskan bahwa LPKSM berkedudukan sebagai lembaga mediasi dan advokasi melalui jalur pengadilan misalkan langkah nyata LPKSM dalam melakukan advokasi melalui jalur pengadilan adalah gugatan LPKSM dalam putusan PN. Klt. No. 69/PDT.G/2012/PN.Klt melalui kuasa hukumnya Taryono, SH, Eko Hari Krisnanto,SH., dan Banu Umbara, SH yang berkantor pada LPKSM mewakili pemberi kuasa bernama Dwi Rinawati melawan PT. PNM Unit Layanan Modal Mikro yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Wisnu Kamulyan, dan Chatarina Intannila Artikasari.

Peran LPKSM selama ini banyak membantu pemerintah dalam melindungi konsumen akan produk baik barang atau jasa yang mereka konsumsi selama ini. Kita telah memiliki Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengusung delapan poin hak konsumen baik barang maupun jasa. Salah satu diantaranya untuk mengurangi tiga kategori kelemahan tadi adalah hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen (Pasal 4 butir f UU No. 8 th. 1999). Hak konsumen yang satu ini adalah hak yang cukup

mendasar dan akan menjadi modal satu-satunya untuk memperjuangkan hak-hak lainnya. Sebab bagaimana mungkin seorang konsumen dapat menilai informasi produk, memilih barang dengan baik, berani menyampaikan pendapat dan menuntut kompensasi ganti rugi, melakukan advokasi serta perlawanan secara hukum, apabila belum terbina dan terdidik dengan baik.

Perlindungan hukum yang dilakukan LPKSM Solo Raya dalam menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan melalui: *Pertama*, sosialisasi meliputi kegiatan tentang: (a) informasi tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Koordinator Solo Raya baik yang bersifat kedalam atau keluar; (b) sosialisasi tentang berbagai pelaksanaan program kerja atau rencana program kerja; (c) sosialisasi materi Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen.

*Kedua*, memberi nasehat/melayani konsultasi kepada konsumen yang memerlukan. Kinerja ini dimaksudkan peningkatan sumber daya baik berupa kelembagaan atau pemberdayaan masyarakat luas yang memerlukan konsultasi/nasehat sehubungan dengan informasi perlindungan konsumen dan dapat berupa pemberdayaan. *Ketiga*, koordinasi/kerjasama bertujuan untuk menciptakan keserasian antar institusi dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Koordinator Wilayah Solo Raya serta lembaga pemerintahan yang terkait untuk membantu kelancaran penyelenggaraan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Koordinator Wilayah Solo Raya yang berkenaan dengan perlindungan konsumen.

### **Pola-Pola Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh LPKSM Solo Raya dalam Menangani Pengaduan dan Menyelesaikan Sengketa Konsumen**

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).<sup>5</sup>

Pola-pola perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui jalur non litigasi maupun litigasi dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, non-litigasi berupa: (a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dengan cara menghadiri seminar-seminar; (b) memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukan baik secara langsung maupun tidak secara langsung; (c) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen melalui mediasi antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Ayat (3) huruf a, b, dan d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf a, b, dan d PP No. 59 Tahun 2001 tentang LPKSM.

*Kedua*, dengan cara litigasi membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana LPKSM berkedudukan sebagai penggugat dalam surat kuasanya dan gugatan masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) walaupun dari beberapa gugatan ditolak.

---

<sup>5</sup>Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001, Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Selain itu LPKSM sering melakukan pendampingan dalam perkara pidana yang dialami konsumen khususnya terhadap kasus tuduhan penggelapan barang fidusia barang bergerak di kepolisian dan rata-rata hampir kasus tidak dilanjutkan karena banyak sekali lembaga pembiayaan yang tidak mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2012 yang mewajibkan kepada lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan transaksi kredit fiducia ke notaris. Terhadap peraturan tersebut banyak lembaga pembiayaan tidak melaksanakannya sehingga konsumen tidak bisa dituntut secara pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kedudukan LPKSM Solo Raya dalam menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen: Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dengan cara menyebarkan brosur-brosur yang berisi hak dan kewajiban konsumen di beberapa pertemuan penting baik seminar maupun pada acara sosialisasi dengan instansi-instansi ditingkat RT sampai kelurahan, memberi nasihat kepada konsumen dengan menerima pengaduan konsumen sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi masing-masing konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen melalui mediasi dan litigasi baik dari tahap penyidikan bahkan sampai pengadilan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat biasanya memakai jasa advokat dari PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) untuk menyelesaikan sengketa



konsumen, Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf a, b, dan c PP No. 59 Tahun 2001 tentang LPKSM serta pendapat dari Bapak Sunarno, SP.,SH.,M.Si selaku ketua LPKSM Surakarta.

Pola-pola perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPKSM Surakarta sebagai berikut: Non-litigasi, berupa: Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dengan cara menghadiri seminar-seminar; memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukan baik secara langsung maupun tidak secara langsung; membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen melalui mediasi antara pelaku usaha dan konsumen.

Litigasi berupa: membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana LPKSM berkedudukan sebagai penggugat dalam surat kuasanya dan gugatan masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) walaupun dari beberapa gugatan ditolak. Selain itu LPKSM sering melakukan pendampingan dalam perkara pidana yang dialami konsumen khususnya terhadap kasus tuduhan penggelapan barang fidusia barang bergerak di kepolisian dan rata-rata hampir kasus tidak dilanjutkan karena banyak sekali lembaga pembiayaan yang tidak mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2012 yang mewajibkan kepada lembaga pembiayaan untuk mendaftarkan transaksi kredit fidusia ke notaris. Terhadap

peraturan tersebut banyak lembaga pembiayaan tidak melaksanakannya sehingga konsumen tidak bisa dituntut secara pidana.

Menurut penulis untuk menumbuhkan kemampuan dan ketangguhan konsumen yang memiliki jumlah besar dan tersebar luas di seluruh tanah air, serta upaya perlindungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dituntut berperan besar, bekerja dan bertugas dalam melindungi konsumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat telah ditentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Oleh karena itu menurut penulis, peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam kegiatan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan. Di samping pula perlu adanya pengakuan dari pemerintah untuk mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai lembaga resmi pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Sasaran umum untuk membina, mengembangkan dan melindungi konsumen yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan keharusan yang tidak boleh

ditinggalkan demi terwujudnya tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melindungi, memberikan informasi, nasihat, membantu konsumen dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

### **Saran**

Perlu diatur pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat (LPKSM) di tiap daerah mengingat saat ini Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak banyak terbentuk di daerah-daerah di Indonesia sehingga sangat minim pengetahuan masyarakat konsumen dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen serta hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah hendaknya melakukan seleksi terhadap pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat (LPKSM) di daerah-daerah setempat supaya tujuan pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Celina, Kristanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mudiarjo, Rapi, 1993, *Bekerjanya Hukum Positif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1991, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas

Indonesia (UI-Press).

Shofie, Yusuf, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Usman, Rahmat, 2004, *Hukum Ekonomi dan Dinamika*, Jakarta: Djambatan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran LPKSM.

Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Memperindag No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran LPKSM.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Erlania, Siti, 2012, "*Sengketa Konsumen*",  
<http://serlania.blogspot.com/2012/02/sengketa-konsumen.html>, 8  
September 2013 pukul 13.30.

<http://lpksmpublik.blogspot.com/>, Download Tanggal 26 Mei 2013 Pukul 08.00 WIB.